

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH
PADA PRODUK KPR DI PT BTN SYARI'AH SURABAYA
(Studi Analisis Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005)**

SKRIPSI



**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah**

Oleh

**DWI SURYANING RETNO NUGROHO
NIM : C02207106**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS * S-2011 062 M	No. REG : S-2011/14/062 ASAL BUKU : TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah
SURABAYA
2011**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Suryaning Retno Nugroho (NIM C02207106) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Juni 2011

Pembimbing



Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag

NIP. 197001031997031001

Jika dilihat sekilas, terdapat ketidaksesuaian pada aturan yang terdapat pada fatwa dan penerapan yang terjadi dan diperjanjikan dalam akad pembiayaan *murābahah* di BTN Syariah Cabang Surabaya. Misalnya tentang penetapan harga jual, menurut fatwa harga jual harus sesuai dengan harga pasar, akan tetapi menurut ketentuan yang ada dalam akad pembiayaan harga jual merupakan harga yang dianggap baik oleh bank. Hal ini tentu menimbulkan kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh bank, bank akan cenderung menetapkan harga sesuai dengan kehendaknya asalkan hutang nasabah lunas, meskipun harga jual dibawah harga pasar.

Dalam kasus penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah yang terjadi pada seorang nasabah BTN Syariah Surabaya, terjadi penetapan harga di bawah pasar yang berlaku atas barang jaminan berupa rumah. Yakni harga awal rumah tersebut ketika nasabah beli dari bank sebesar Rp. 250.000.000,- sudah termasuk margin keuntungan bank cicilan selama 7 Tahun. Akan tetapi pada tahun ketiga, nasabah mengalami kendala dalam hal pelunasan angsuran tersebut. Sehingga pada akhirnya bank menyelesaikan pembiayaan tersebut sampai pada penjualan barang jaminan sebesar Rp. 175.000.000,-, padahal harga rumah dipasaran saat itu dengan tipe rumah yang sama adalah Rp. 200.000.000,-

¹⁶ Dokumen Pembiayaan KPR BTN Syariah Surabaya.

5. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di PT BTN Syariah Surabaya.
6. Penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah di PT BTN Syariah Surabaya.
7. Penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN).

C. Batasan Masalah

Untuk lebih fokus dan mendapat hasil yang cukup dalam penelitian dan adanya keterbatasan penulis dalam dana dan waktu, maka penulis hanya membahas sebagian dari permasalahan yaitu tentang penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah pada produk KPR di BTN Syari'ah Surabaya yang kemudian dianalisis dengan Fatwa DSN Nomor 47/DSN-MUI/II/2005.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan pembiayaan *murābahah* bermasalah pada produk KPR di PT BTN Syariah Surabaya?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah pada produk KPR di PT BTN Syariah Surabaya?

penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang berkaitan dengan judul yang menjelaskan tentang penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah pada produk KPR di BTN Syari'ah Surabaya.

Selanjutnya penulis menganalisis perolehan data tersebut dengan metode deduktif, yaitu dimulai dari dalil yang berkaitan dengan *murābahah* bermasalah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus yaitu penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah pada produk KPR PT. BTN Syari'ah, untuk selanjutnya akan diketahui kesimpulannya.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, dari masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, yang mana antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan ini adalah:

BAB I: Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode yang berisi data yang dihimpun, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

- BAB II:** Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang berdasarkan tinjauan pustaka sebagai dasar berfikir pada bab selanjutnya yang berisikan tentang pembiayaan *murābahah* bermasalah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional.
- BAB III:** Pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian lapangan di PT BTN Syari'ah Cabang Surabaya berkenanan dengan cara dan prosedur penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah pada Produk KPR.
- BAB IV:** Memuat tentang analisis penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah pada produk KPR PT BTN Syariah Surabaya (studi analisis fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005).
- BAB V:** Berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.

barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang haram. Pihak bank dapat membeli barang yang diinginkan nasabah atas nama bank sendiri atau jika bank kesulitan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Pada saat pembelian barang, bank boleh membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian. Setelah barang terbeli, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah dengan keuntungan yang diinginkan dan disepakati kedua belah pihak. Bank diharuskan jujur menyampaikan harga beli kepada nasabah. Kemudian nasabah membayar harga barang tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati. Apabila pihak bank ingin menghindari terjadinya kecurangan nasabah, maka bank dapat melakukan perjanjian khusus.³⁰

2. Ketentuan praktek *murābahah* terhadap nasabah adalah ketika nasabah mengajukan permohonan perjanjian pembelian dan kemudian bank menerima permohonan tersebut, maka bank harus memilihkan dahulu *asset* yang diinginkan nasabah, kemudian setelah adanya kesepakatan dibuatlah kontrak jual beli. Dalam kontrak jual beli tersebut, bank boleh meminta nasabah untuk membayar uang muka saat kontrak jual beli tersebut ditandatangani. Apabila setelah

³⁰M. Yazid Efendi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta, Logung Pustaka, 2009), 96.

D. Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Pada Produk KPR di BTN Syariah

1. Pelaksanaan Pembiayaan *Murābahah* Produk KPR di BTN Syariah

a. Permohonan Pembiayaan *Murābahah* (KPR)

Dalam mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah* di BTN Syariah khususnya pada produk KPR, nasabah diwajibkan untuk mengajukan permohonan secara tertulis. Yaitu dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen persyaratan dalam mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah*.

Bagi nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan KPR BTN Syariah secara umum yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah:

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan,
2. Menyerahkan *copy* identitas diri (KTP, KK, dan akta nikah),
3. Menyerahkan *copy* slip / keterangan gaji atau keterangan penghasilan,
4. Menyerahkan *copy* SK Pegawai atau Keterangan Kerja dari Perusahaan,
5. Menyerahkan *copy* rekening tabungan bank atau BTN dan atau bank lain.

2. Kriteria Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah

Kriteria pembiayaan *murābahah* bermasalah dapat digolongkan menjadi beberapa bagian atau berdasarkan dengan kolektifitas, antara lain:

1. Pembiayaan digolongkan lancar, jika pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan perjanjian kredit atau hari tunggakannya 0-30 hari
2. Dalam Perhatian Khusus adalah pembiayaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran margin atau bagi hasil telah mengalami penundaan (jumlah hari tunggakan 31 – 60 hari).
3. Kurang Lancar adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan (Jumlah hari tunggakan 61 – 90 hari).
4. Diragukan adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan menurut jadwal yang diperjanjikan (Jumlah hari tunggakan 91-180 hari).
5. Macet adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami

Secara teori untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, ada dua strategi yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Penyelamatan pembiayaan, yaitu melalui perundingan kembali antara bank dan nasabah dengan memperingan syarat-syarat pengembalian pembiayaan, sehingga dengan diperingannya syarat-syarat pengembalian tersebut diharapkan nasabah memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan pembiayaan itu.
2. Penyelesaian pembiayaan, yaitu melalui lembaga hukum seperti Pengadilan atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau Badan lainnya dikarenakan langkah penyelamatan tidak dimungkinkan lagi. Tujuannya adalah untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan.

Seperti yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya, tindakan penanganan terhadap pembiayaan *murābahah* bermasalah dilakukan oleh unit CWO. CWO bertugas untuk memantau dan membina nasabah bermasalah. Beberapa tindakan yang diambil oleh CWO dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada nasabah yang bernama Sunaryo Utomo tersebut adalah langkah pertama karena keterlambatan pada awal bulan Mei ia masuk pada kolektifitas 1 dan 2, maka pihak bank mengingatkan melalui telepon. Tujuannya adalah untuk mengingatkan nasabah apabila nasabah lupa untuk melaksanakan

kewajibannya. Dan bank memasukkan Sunaryo Utomo pada daftar debitur menunggak. Pada minggu kedua, masuk kategori kolektifitas 1 dan 2 terutama kolektifitas 2 akan dikirim surat oleh Bank yaitu Surat Konfirmasi. Kemudian minggu ketiga ditelepon ulang dan diusahakan agar Bapak Sunaryo Utomo akan melakukan pembayaran angsuran sebesar pembayaran 2 bulan. Setelah satu bulan, ternyata pihak Bapak Sunaryo Utomo menerima Surat penagihan (SP1) yang dikirim oleh bank, apabila masih tidak diindahkan oleh nasabah tersebut, maka bank akan mengirimkan SP2. Karena selang 2 minggu dari SP kedua masih tidak ada tindak lanjut dari nasabah tersebut, maka pihak bank mengirimkan SP3. Ternyata setelah pengiriman SP3 oleh bank, pihak nasabah tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak bank melakukan kunjungan ke tempat nasabah dengan membawa Surat Kesanggupan Pembayaran Kewajiban Angsuran. Pada saat itu, pihak bank menempelkan stiker warna putih yang bertuliskan "Dimohon agar pemilik rumah ini menghubungi BTN Syariah". Setelah satu bulan setelah penempelan stiker putih, masih belum juga ada itikad baik dari nasabah, maka pihak bank segera melakukan penyegelan dan menempelkan stiker berwarna merah yang bertuliskan "Rumah ini dalam

sebelumnya, hal tersebut merupakan hambatan yang paling sering terjadi. Data mengenai identitas nasabah merupakan hal yang paling penting dalam setiap pembiayaan. Tindakan nasabah dengan sengaja tidak memberitahukan/menginformasikan mengenai perubahan alamat kepada pihak bank selama masa pembiayaan merupakan wujud dari itikad tidak baik dari nasabah. Tindakan ini pada akhirnya dipersamakan dengan tindakan nasabah yang kabur/ melarikan diri.

Apabila terjadi demikian, maka pihak bank akan berusaha mencari keberadaan nasabah melalui beberapa informasi dari berbagai pihak. Namun setelah upaya tersebut dilakukan akan tetapi nasabah masih belum diketahui keberadaannya, maka pihak bank dengan terpaksa akan melaksanakan tindakan eksekusi jaminan.

Faktor berikutnya yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah adalah ketika nasabah mengajukan pembiayaan *murābahah* untuk orang lain. Di Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya sendiri, diterapkan peraturan yang melarang nasabah untuk mengajukan pembiayaan *murābahah* yang ditujukan oleh orang lain. Sebab pernah terjadi kasus dimana seorang nasabah mengajukan pembiayaan *murābahah* untuk kakaknya. Kakak dari nasabah juga tidak mau dimintai pertanggungjawaban. Akhirnya pihak bank mengambil tindakan untuk mengeksekusi objek jaminan.

Kemudian faktor penyebab berikutnya ketika nasabah wanprestasi. Nasabah yang seperti ini biasanya dilatarbelakangi oleh watak/ karakter nasabah. Pihak bank menyebut nasabah yang seperti ini dengan sebutan nasabah nakal. Namun tidak semua nasabah wanprestasi disebabkan karena kesengajaan dari pihak nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran. Ada pula nasabah yang wanprestasi karena nasabah tersebut tidak mampu. Hal ini bias disebabkan karena nasabah mengalami kemerosotan usaha, nasabah kehilangan pekerjaannya, ataupun karena nasabah mengalami musibah.

Mengenai upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi sebagai akibat dari tindakan nasabah yang wanprestasi, khususnya dikarenakan wanprestasi terhadap isi akad pembiayaan *murābahah*, pihak bank dan nasabah sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah. Untuk nasabah yang kooperatif karena tidak melakukan wanprestasi secara sengaja, pihak bank akan memberikan keringanan. Keringanan yang diberikan oleh bank biasanya dalam bentuk potongan margin, pengurangan atau penghapusan denda tunggakan, ataupun jangka waktu angsuran. Apabila belum tercapai kesepakatan, maka para pihak akan menyelesaikannya dengan bantuan Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional), sesuai dengan yang tertuang dalam akad pembiayaan *murābahah* BTN Syariah.

Kemudian faktor terakhir penyebab pembiayaan bermasalah yang dikemukakan oleh pihak bank adalah tidak adanya sikap kooperatif nasabah.

Harusnya terjadi musyawarah antara pihak bank dan nasabah yang bertujuan untuk menghasilkan suatu kesepakatan mengenai bagaimana jalan penyelesaian yang baik bagi kedua belah pihak. Pihak bank akan menawarkan solusi-solusi untuk menjual objek jaminan atau mengalihkan pembiayaan kepada pihak lain.

Jadi dari beberapa faktor penyebab pembiayaan *murābahah* yang dijelaskan oleh pihak bank, dan dari beberapa solusi yang ditawarkan., apabila nasabah ternyata tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaannya, maka solusi terakhir yang ditawarkan dan diambil adalah mengeksekusi atau menjual barang jaminan (rumah). Baik itu melalui lembaga pelelangan atau dengan bantuan Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional), seperti yang tertuang dalam akad pembiayaan *murābahah* BTN Syariah.

B. Analisis Kesesuaian Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Pada Produk KPR Di PTN BTN Syariah Dengan Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005

Pada saat nasabah bermasalah masuk pada kategori macet, maka pihak bank akan melakukan tindakan penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah. Tindakan yang dilakukan oleh pihak bank adalah dengan menjual atau mengeksekusi objek jaminan.

Meskipun Bank Tabungan Negara Syariah merupakan Unit usaha dari Bank Tabungan Negara Konvensional, akan tetapi Bank Tabungan Negara Syariah harus tetap tunduk pada Hukum Islam. Ditinjau dari salah satu fatwa Dewan Syariah Nasional, yaitu fatwa DSN Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *murābahah* Bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar, terdapat beberapa ketidaksesuaian.

Dari fatwa DSN menyatakan untuk penjualan obyek *murābahah* atau jaminan lainnya, hendaknya pihak bank menjualnya dengan harga pasar yang telah disepakati. Sedangkan dalam akad pembiayaan *murābahah* BTN Syariah ada ketentuan bahwa bank menetapkan harga penjualan yang dianggap baik oleh bank tersebut. Jika kita bandingkan dari kedua ketentuan di atas, terdapat suatu perbedaan mengenai penetapan harga jual barang jaminan. Dapat kita tafsirkan secara sederhana, harga tersebut ditentukan sepihak oleh bank. Menurut pihak bank, mereka mempunyai perhitungan sendiri dalam menentukan harga penjualan jaminan tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya harga yang dianggap baik oleh Bank tadi adalah harga yang jauh di bawah harga pasar. Hal ini tentu sangat merugikan bagi nasabah yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa penentuan harga penjualan yang dilakukan sepihak oleh bank merupakan suatu bentuk ketidakadilan, karena lebih menguntungkan bank dan di sisi lain merugikan nasabah. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip syariah yakni berdasarkan al-Qur'an dan hadits :

nasabah juga rela, namun penentuan harga dari awal adalah atas keputusan sepihak dari bank yang pada akhirnya akan merugikan pihak nasabah. Dari sini jelas terlihat ketidaksesuaian dengan fatwa dan prinsip syariah.

Selain itu, mengingat bahwa objek jaminan adalah tanah dan bangunan (rumah) maka sesuai dengan peraturan yang berlaku, peralihan kepemilikannya pun menimbulkan berbagai biaya yang nantinya akan timbul yang akan sangat membebani nasabah, sebab harus ditanggung oleh nasabah. Karena dalam *murābahah* peralihan kepemilikan suatu barang dimulai sejak terjadinya akad pembiayaan *murābahah* tersebut. Berbeda dengan *Ijarah* yang merupakan bentuk pemindahan hak pakai/ guna tanpa pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sehingga sistem pembayarannya berupa upah sewa, dan ketika sudah habis masa pakai/ gunanya baik pihak nasabah maupun bank sama-sama merasa diuntungkan.

Lalu fatwa DSN yang berikutnya adalah nasabah dapat melunasi sisa hutangnya kepada bank dari hasil penjualan barang jaminan tersebut. Dalam akad pembiayaan *murābahah* BTN Syariah Pasal 17 ayat 4 bahwa hasil dari eksekusi atau penjualan jaminan milik nasabah diprioritaskan untuk melunasi seluruh sisa hutangnya nasabahnya.

Ketentuan fatwa yang kedua ini telah sesuai dengan pelaksanaan di Bank Tabungan Negara Syariah. Tujuan dari penjualan objek jaminan adalah untuk melunasi hutang nasabah, jadi memang sudah seharusnya jika hasil penjualan objek jaminan diprioritaskan untuk pelunasan sisa hutang nasabah tersebut.

Fatwa ketiga DSN menyatakan bahwa nasabah jika dari hasil penjualan barang jaminan melebihi sisa hutang nasabah atau dengan kata lain setelah dikurangi untuk melunasi hutang nasabah dan ternyata ada sisa, maka bank wajib mengembalikan sisanya tersebut. Dalam akad pembiayaan *murābahah* BTN Syariah juga menyatakan apabila masih ada sisa dari hasil penjualan jaminan maka jumlah sisa tersebut akan dibayarkan kepada nasabah.

Kedua ketentuan di atas merupakan ketentuan yang sudah tepat. Sisa hasil penjualan merupakan hak dari nasabah, sehingga memang sudah seharusnya untuk dikembalikan kepada nasabah. Apabila hasil dari penjualan tersebut setelah dikurangi dengan tanggungan hutang nasabah masih ada sisa, maka bank wajib mengembalikan sisanya kepada nasabah. Dan ini sudah diterapkan oleh BTN Syariah.

Fatwa DSN keempat menyebutkan jika hasil dari penjualan barang jaminan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang nasabah tersebut tetap menjadi tanggungan nasabah. Dalam akad pembiayaan *murābahah*

BTN Syariah Surabaya disebutkan apabila hasil penjualan rumah jaminan belum mencukupi untuk melunasi seluruh hutang nasabah, maka sesuai dengan peraturan pihak bank berhak untuk mengambil pelunasan hutang tersebut dari hasil penjualan harta lain milik nasabah.

Sisa utang yang jumlahnya belum dapat tercukupi dari hasil penjualan objek jaminan tentu masih tetap akan menjadi tanggungan nasabah. Nasabah wajib melunasi hutang tersebut, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak Bank. Hal ini sebenarnya bisa terjadi lantaran harga penjualan yang tidak sesuai dengan harga pasar sehingga malah merugikan nasabah.

Kemudian ketentuan fatwa DSN yang terakhir adalah ketika nasabah setelah penjualan jaminan dan hasil penjualan tersebut sudah dipotong dengan sisa hutangnya, akan tetapi tetap tidak lunas juga maka pihak bank dapat membebaskannya dari hutang tersebut. Sedangkan dalam akad pembiayaan *murābahah* BTN Syariah menyatakan bahwa apabila hasil penjualan rumah jaminan belum mencukupi untuk melunasi seluruh hutang nasabah, maka sesuai dengan peraturan pihak bank berhak untuk mengambil pelunasan hutang tersebut dari hasil penjualan harta lain milik nasabah.

Adanya klausula yang menyebutkan bahwa pihak bank berhak untuk mengambil pelunasan atas sisa hutang dari penjualan harta lain

milik nasabah sebaiknya perlu dikaji lagi. Sebab klausula tersebut terdengar seperti suatu bentuk kesewenang-wenangan. Bagaimana jika ternyata kekurangan sisa hutang nasabah disebabkan karena pihak bank menentukan harga penjualan lebih rendah jika dibandingkan dengan sisa hutang yang harus dibayar oleh nasabah seperti halnya yang terjadi pada kasus di bab sebelumnya. Seharusnya apabila terjadi hal demikian, maka nasabah dan pihak bank dapat melakukan perundingan untuk menentukan kesepakatan mengenai bagaimana tata cara pelunasan kekurangan sisa hutang nasabah.

Dari perundingan tersebut mungkin dapat dihasilkan solusi-solusi yang tidak memberatkan salah satu pihak, misalnya membuat perjanjian hutang-piutang baru atau pihak bank memberikan perpanjangan waktu pelunasan sisa hutang nasabah, mengingat sebagai bank syariah, seharusnya BTN Syariah dapat menjunjung prinsip tolong-menolong dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

oleh bank. Selain itu, pada poin kelima fatwa disebutkan Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya. Akan tetapi pelaksanaannya, pihak bank tidak memungkinkan adanya pembebasan sisa hutang. Pada akad pembiayaan disebutkan apabila hasil penjualan rumah itu tidak mencukupi untuk membayara hutang, maka pihak bank berhak mengambil pelunasan atas sisa hutang dari penjualan harta lain milik nasabah. Pada intinya, pihak bank tidak mau dirugikan ketika terjadi pembiayaan bermasalah. Berdasarkan hasil wawancara, pihak bank tidak dapat membebaskan seorang nasabah dari hutangnya sebab pihak bank dituntut untuk dapat mempertahankan nilai NPF (*Non Performing Finance*)nya. Dengan NPF rendah, maka bank masuk kategori bank yang sehat, sehingga menimbulkan kepercayaan di kalangan masyarakat.

B. Saran

1. Pada saat penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah, telah disebutkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional bagaiman seharusnya cara yang ditempuh. Bagi LKS, khususnya Perbankan Syariah, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya haruslah selalu berpegang teguh pada ajaran Islam dan aturan-aturan yang berlaku. Sebab pada dasarnya Islam yang menjadi acuan dari bank syariah, selalu mengajarkan prinsip tolong menolong kepada

sesama umat. Jadi seharusnya pihak bank syariah harus lebih mengikuti ajaran Islam sebagaimana tersebut dalam fatwa.

2. Pihak BTN Syariah Surabaya hendaklah benar-benar menrepakan ketentuan atau peraturan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional. Jika BTN Syariah merasa takut mengalami kerugian, hendaklah mengganti beberapa produk dengan sistem atau akad yang lain. Misalnya pada produk dengan menggunakan akad *murābahah* pada produk KPR iB yang diganti dengan menggunakan akad *Ijarah* agar antara kedua belah pihak saling diuntungkan karena sama-sama sudah melaksanakan kewajibannya.
3. Bagi nasabah yang hendak mengajukan atau sedang dalam masa pembiayaan *murābahah*, hendaklah mengetahui dan memahami dengan benar mengenai isi akad pembiayaan, sehingga nasabah diharapkan dapat memahami dengan benar apa yang menjadi hak dan kewajibannya selama masa pembiayaan. Dengan demikian akan terwujud suatu kerjasama yang baik antara nasabah dengan bank.

